

**PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PONOROGO TERHADAP PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015**

**(Study Kasus pada Mahasiswa FKIP Prodi PPKn Semester IV
Tahun Akademik 2013/2014)**

SITI ROSYIDAH

NIM. 11311758

PEMBIMBING I : ARDHANA JANUAR MAHARDHANI, S.AP., M.KP

PEMBIMBING II : Drs. EKO HERRY SUPRAYITNO M.Pd

ABSTRAK

Rosyidah, Siti. 2015. *“Persepsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 (Study Kasus pada Mahasiswa FKIP Prodi PPKn Semester IV Tahun Akademik 2013/2014)”*. Skripsi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing (I) Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP. Pembimbing (II) Drs. Eko Herry Suprayitno. M.Pd.

Kata Kunci : Persepsi Mahasiswa, Pilkada

Pilkada merupakan salah satu pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah yang ada di wilayah baik wilayah Kabupaten maupun di wilayah Provinsi. Pilkada secara konstitusional di atur dalam ayat 4 Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih oleh rakyat secara demokratis. Melalui pilkada masyarakat khususnya mahasiswa akan memberikan pilihan dan suara melalui pesta demokrasi tentang pemilihan kepala daerah yang akan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan dalam periode yang telah ditentukan dengan undang-undang.

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibahas adalah : “Bagaimana persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan

umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sumber data adalah mahasiswa PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keragaman persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu arti pilkada, pandangan pilkada, persyaratan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah, bentuk partisipasi di pilkada, serta harapan di Pilkada. Saran yang dapat peneliti berikan adalah agar mahasiswa mampu memahami pendidikan politik, mempelajari peraturan dan perundang-undangan untuk menambah wawasan dalam pelaksanaan pilkada dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada untuk menentukan suatu pemimpin di daerah setempat.

ABSTRACT

Rosyidah, Siti. 2015. *"Perception Student University of Ponorogo on Election of Regional Head Ponorogo 2015 (Case Study on Student Guidance and Counseling Prodi PPKn IV Semester Academic Year 2013/2014)"*. Thesis, Pancasila and Citizenship Education, the Faculty of Education, University of Muhammadiyah Ponorogo. Supervisor (I) Ardhana Januar Mahardhani, S.AP., M.KP. Supervisor (II) Drs. Eko Herry Suprayitno. M.Pd.

Keywords: Perception of Students, Elections

The elections were a democratic party one of the people in choosing the head region in either the district or region in the province. The elections constitutionally set in paragraph 4 of Article 18 of the Constitution in 1945 that governors, regents, and the mayor as head of provincial governments, district and city democratically elected by the people. Through the community, especially the student election will provide choice and voice through the democratic party of the local elections that will lead and organize the administration within the period specified by law.

In this study the formulation of the problem discussed is: " What are the perceptions of students FKIP Prodi PPKn fourth semester of academic year 2013/2014 the University of Muhammadiyah Ponorogo toward elections of regional heads Ponorogo 2015? ". This study aims to determine students' perceptions of FKIP Prodi PPKn fourth semester of the year 2013/2014 the University of Muhammadiyah Ponorogo toward elections of regional heads Ponorogo 2015.

This research was conducted at the University of Muhammadiyah Ponorogo. The data source is PPKn students of fourth semester of the academic year 2013/2014. The procedure of collecting data using interviews,

documentation, and documentation study. Analysis of the data used in this research is qualitative descriptive analysis.

Based on the results of the study indicate that there are students' perceptions of diversity FKIP Prodi PPKn fourth semester of 2013/2014 academic year of the University of Muhammadiyah Ponorogo 2015 elections that the meaning of the election, the election outlook, the requirements of prospective head and deputy head of the region, the form of participation in the elections, as well as hope in the elections. Suggestions given is that students are able to understand political education, regulation and legislation to broaden the implementation of the elections and participated in the implementation of the election to determine a leader in the local area.

PENDAHULUAN

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131). Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota sejak Indonesia merdeka sebelum tahun 2005 hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) mengangkat isu terkait pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Namun hal tersebut membuat banyak kalangan kecewa bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD membuat demokrasi di Indonesia ini menjadi hilang yang seharusnya pemimpin dipilih oleh rakyat untuk rakyat menjadi kewenangan DPRD. Pada tanggal 17 Februari 2015 DPR mengesahkan UU No. 1 tahun 2015 tentang pilkada. Disahkannya UU Pilkada, maka rakyat Indonesia tetap dapat memilih langsung kepala daerah masing-masing. Namun saat ini banyak masyarakat khususnya para mahasiswa yang dinilai kurang berpartisipasi aktif dalam politik pemerintahan baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur. Sekitar 90 % mahasiswa dinilai kurang berpartisipasi dalam politik pemerintahan baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Menurut anggota KPU Bojonegoro “selama ini mahasiswa masih cuek dengan adanya pemilihan seperti pemilu/pemilukada. Kalaupun yang aktif itu sangat sedikit”. Tidak banyak dari mereka yang berargumentasi bahwa setelah terpilihnya pemimpin di suatu daerahnya tidak menguntungkan bagi mereka, karena pemimpin dari tahun sebelumnya banyak yang lupa akan janji serta visi misi saat kampanye. Selain itu menurut Reporter Ainur Rohim “kecenderungan publik sekarang makin apatis terhadap agenda politik. Liberalisasi politik yang dijalankan sejak reformasi 1998 sampai sekarang ternyata belum mampu menjawab berbagai problem mendasar bangsa: luasnya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kesejahteraan rakyat secara signifikan, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara lebih layak, jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, dan lainnya. Apatisme warga itu dipastikan bakal meningkatkan golput di pilkada 2015 nanti. Selama ini, tingkat partisipasi pemilih di tiap perhelatan pilkada bergerak di angka 60% sampai 70%. Kemungkinan besar, pada pilkada nanti bakal makin turun. Memilih atau tidak memilih tak ada pengaruhnya bagi masa depan mereka. Prinsip simple itu yang mungkin tertanam kuat di pikiran mayoritas pemilih”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena persepsi mahasiswa terhadap pilkada. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Keguruan

dan Ilmu Pendidikan Prodi PPKn Semester IV tahun akademik 2013/2014 dengan bidang kajian masalah pemilihan umum kepala daerah. Penentuan lokasi tersebut karena Universitas Muhammadiyah Ponorogo memiliki mahasiswa prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 yang kritis dalam masalah politik terutama dalam bidang kajian Pilkada. Sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Prodi PPKN semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan percakapan langsung dengan mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sebelumnya telah ditentukan. Serta mengamati mahasiswa PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 sebagai obyek penelitian. Studi dokumentasi menggunakan rekaman. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yaitu model analisis interaksi atau *interactive analysis models* dengan langkah-langkah yaitu : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Pada deskripsi hasil penelitian akan dipaparkan tentang persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Pada dasarnya pilkada yaitu pemilihan untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah secara langsung yang dipilih melalui aspirasi masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ada. Untuk itu pilkada secara langsung merupakan jaminan bagi setiap warga Negara untuk dapat

menggunakan hak pilihnya khususnya bagi mahasiswa yang sudah berhak dalam menentukan hak pilihnya di pilkada. Banyak mahasiswa yang sudah mengenal dan paham tentang pilkada dari hasil penelitian terdapat 5 macam persepsi yaitu persepsi terhadap arti pilkada, persepsi pandangan pilkada, persepsi terhadap persyaratan calon kepala dan wakil kepala daerah, persepsi terhadap bentuk partisipasi dalam pilkada dan persepsi terhadap harapan pilkada.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi pembahasan tentang persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Pelaksanaan pilkada yang akan di adakan tahun 2015 di Kabupaten Ponorogo menimbulkan persepsi mahasiswa yang dapat diklasifikasikan dalam 5 persepsi yaitu :

a. Persepsi Mahasiswa terhadap Arti dari Pilkada.

Mengacu dari hasil penelitian di atas dalam persepsi mahasiswa fkip Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015 bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang hampir sama mengenai arti dari pilkada. Pilkada yaitu pemilihan kepala daerah untuk menentukan kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui aspirasi rakyat untuk menentukan pasangan pemimpin yang terbaik di tingkat Kabupaten.

Menurut Sumarno (2005:131) pilkada yaitu "pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan". Sedangkan menurut salah satu mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Nia Rachmawaty pilkada adalah "pesta rakyat yang bisa dikatakan saat ini saat dimana rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam memilih pemerintah di suatu daerah".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa makna pilkada adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala daerah beserta wakil kepala daerah di suatu pemerintahan daerah yang berasal dari usulan partai politik tertentu dan gabungan partai politik atau secara independen yang telah memenuhi persyaratan.

Bagi Mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo pilkada langsung merupakan bentuk aspirasi mereka dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Tentunya suara mereka memiliki kualitas dalam mendorong suksesnya penyelenggaraan sebuah pemilihan umum. Mahasiswa harus berperan aktif dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

b. Persepsi Mahasiswa terhadap Pandangan Pilkada di Kabupaten Ponorogo tahun 2015.

Persepsi Mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pandangan pilkada di Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu pilkada tahun 2015 ini masih diperebutkan suatu kekuasaan di partai dan jelas sekali banyak kecurangan terutama dengan adanya praktek politik uang.

Dalam pelaksanaannya pilkada di Indonesia sering terlihat banyak adanya praktek kecurangan. Pemilihan umum yang dinilai

sebagai pesta demokrasi pun ternyata belum bisa mengimplementasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya. Karena didalam proses pelaksanaanya pilkada masih di suguhi adanya praktek kecurangan yang di lakukan oleh kandidat pemilu maupun partainya sendiri. Salah satu kecurangan pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih peserta pemilu yang melakukan politik uang tersebut. Selain itu adanya praktek goulput yang membuat masyarakat tidak mau ikut berpartisipasi menyumbangkan suara mereka karena mereka menganggap bahwa setelah terpilihnya seorang pemimpin tidak menguntungkan bagi mereka karena mereka beranggapan bahwa pemimpin mereka lupa dengan janji-janji serta visi misi saat kampanye.

Hal ini membuat pandangan mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo bahwa pilkada ini masih di warnai dengan adanya praktek politik uang dan tingginya angka goulput.

c. Persepsi Mahasiswa terhadap Persyaratan Calon Pasangan Pilkada.

Persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap persyaratan calon kepala dan wakil kepala daerah untuk pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu para pemimpin harus mempunyai visi misi jelas, jujur, merakyat, tidak perlu kampanye berlebihan, memiliki intelektual baik, memiliki agama, dan memiliki jasmani rohani yang baik. Berdasarkan UU No. 1 tahun 2015 pasal 7 bahwa bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat yaitu Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, Berpendidikan

paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran, Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan, Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan, Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak, Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri, Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Sedangkan menurut salah satu Mahasiswa FKIP PPKn semester IV Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang bernama Nia Rachmawaty persyaratan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah adalah "bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat secara intelektual, secara agama, secara jasmani dan rohani yang bagus".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat adalah Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat, Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, pada saat pendaftaran, Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan, Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan, Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak, Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri, Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah. Selain itu

untuk bakal calon kepala dan wakil kepala daerah juga harus memiliki intelektual yang baik.

d. Persepsi Mahasiswa terhadap Bentuk partisipasi dalam Pilkada

Persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam bentuk partisipasi terhadap pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu mereka menganggap dirinya sudah cukup umur, lalu sebagai mahasiswa yang baik khususnya jurusan PPKn mereka akan berpartisipasi langsung di Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Mereka tidak ingin mengurangi angka goul put di Pilkada tahun 2015. Mereka sangat setuju bila Pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 ini dipilih melalui aspirasi rakyat Ponorogo secara langsung bisa menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan seorang pemimpin di daerah Kabupaten Ponorogo.

Pilkada adalah momentum untuk menentukan masa depan daerah yang lebih baik. Masa depan yang baik ditentukan sejauhmana rakyat ikut dalam pelaksanaan pilkada dan memanfaatkan momentum pilkada dengan baik. Terutama untuk seorang mahasiswa harus memiliki sikap kritis dalam menentukan seorang pemimpin di daerah untuk kedepan. Kecerdasan dalam memilih merupakan bentuk kritis rakyat dalam mempertaruhkan masa depan. Memilih tidak hanya didasari pengetahuan sepintas akan calon-calon pilihan, apalagi tanpa pengetahuan sepintas akan calon-calon pilihan, bahkan memilih karena adanya politik uang. Mahasiswa harus menciptakan budaya politik partisipan.

e. Persepsi Mahasiswa terhadap Harapan Pilkada

Persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam memberi harapan untuk pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu pilkada tahun 2015 ini bisa membawa Kabupaten Ponorogo lebih baik, pemimpin yang tepat pada pilihan masyarakat Ponorogo

yang jujur adil berkualitas baik, serta tidak ada kecurangan seperti politik uang.

Semua masyarakat berharap pilkada Kabupaten Ponorogo tahun 2015 melahirkan pemimpin yang lebih baik, tetapi harapan itu bila tidak dilaksanakan dengan pilihan yang baik, cerdas maka akan sia-sia. Rakyat khususnya mahasiswa harus cerdas dalam memilih tidak memilih hanya karena ada uang dan popularitas. Sebaiknya memilih dengan pilihan kita yang membawa harapan rakyat

Harapan adalah sebuah impian yang tidak akan pernah pupus selagi keinginan dan kebutuhan masih ada. Harapan akan terus berlanjut untuk lebih baik dan semakin baik, seiring dengan dinamika kehidupan. Ditengah tingginya harapan, masih ada peluang besar untuk calon-calon pemimpin di daerah yang bisa memberikan harapan yang lebih baik.

Masyarakat mengharapkan pemimpin yang mampu mewujudkan aspek kesejahteraan dan keadilan. Calon pemimpin harus menunjukkan dan meyakinkan bahwa rakyat khususnya mahasiswa tidak akan diberikan janji dan harapan palsu, tetapi harapan yang akan diwujudkan dan dibuktikan. Menurut Gumilang (2010:1) "masyarakat memiliki harapan yang besar terhadap pilkada. Harapan akan terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ingin dengan pemimpin baru masyarakat menjadi sejahtera, pendidikan serta keamanan terjamin. Masyarakat pintar dan cerdas, keluarga sehat, beribadah tenang. Dan sejumlah harapan lainnya". Sedangkan menurut salah satu mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 yang bernama Yuli Fatimah: "harapan saya semoga pilkada ini bisa membawa Ponorogo maju lebih baik dari sebelumnya dari segala aspek".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Pilkada ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dari segala aspek dan mampu mensejahterakan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Pada dasarnya persepsi tersebut merupakan bagian dari hasil pengamatan dan pengalaman yang dialami sendiri oleh mahasiswa dalam pelaksanaan Pilkada. Berbagai macam persepsi mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo terhadap pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2015 yaitu: Persepsi mahasiswa terhadap arti Pilkada, Persepsi mahasiswa terhadap pandangan Pilkada, Persepsi mahasiswa terhadap persyaratan bakal calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada, Persepsi mahasiswa terhadap bentuk partisipasi terhadap Pilkada, Persepsi mahasiswa terhadap harapan Pilkada.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada mahasiswa FKIP Prodi PPKn semester IV tahun akademik 2013/2014 Universitas Muhammadiyah Ponorogo agar dapat mempelajari peraturan perundang-undangan untuk menambah wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada dan sebagai mahasiswa harus aktif ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Ponorogo.
2. Kepada Dosen FKIP Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat membimbing para mahasiswa dalam pendidikan politik untuk menambah wawasan para mahasiswa dalam pelaksanaan Pilkada.
3. Kepada Masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo dapat mempelajari peraturan dan perundang-undangan pelaksanaan Pilkada dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta untuk menambah wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus M. Hardjana. 2003. *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal*. Yogyakarta : Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Chaplin, J. P. 2008. *Kamus Psikologi Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- J. Moloeng, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama.
- Sarwono, Sarlito. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Shaleh, Abdul Rahman & Wahab, Muhibb Abdul. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shaleh, Abdul Rahman. 2009. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Stenberg, J Robert. 2008. *Psikologi Kognitif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subiyanto, Ibnu. 2000. *Metode Penelitian Manajemen dan Akuntansi*. Yogyakarta: UPP.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatmiko. Eko 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarno, Siswanto. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo, 2004. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.

Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Makalah:

Hasanuddin M. Saleh. *Perilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung Di Riau: Suatu Bahasan Awal*. Makalah pada seminar yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Riau, 2 September 2007 di Pekanbaru.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Internet :

Lampung News.com. Pilkada: Antara Harapan dan Kenyataan, Lampung Ekspres news Edisi Selasa, 20 04 2010 Oleh: Andi Perdana Gumilang. Diakses pada 20 Agustus 2015 pukul 13:12.

http://beritajatim.com/sorotan/240226/19_pilkada_di_jatim_kembali_ke_peta_1955?.html#.VeV27n2xjCM Di akses pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 15:20.